



PEMERINTAH KOTA BIMA

# **LAPORAN KEUANGAN**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN, DAN  
PENGEMBANGAN

TAHUN ANGGARAN 2018

TAHUN 2019

**PENJELASAN POS-POS  
LAPORAN KEUANGAN  
(CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN)**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kota Bima yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 telah disusun. Laporan keuangan tersebut disusun sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah, serta peraturan-peraturan perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab pengelolaan keuangan negara.

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel, serta berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut. Laporan Keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan ini semoga dapat memberikan informasi yang cukup memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di BAPPEDA LITBANG Kota Bima.

Kota Bima, Februari 2019  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

**Ir. DARWIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 199103 1 087

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Lampiran .....	iv
Pernyataan Tanggung Jawab .....	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	vi
II. LAPORAN OPERASIONAL .....	vii
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	viii
IV. NERACA .....	ix
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	7
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD .....	9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD .....	11
2.1. Ekonomi Makro .....	11
2.2. Kebijakan Keuangan .....	11
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	12
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD .....	16
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	16
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan .....	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....	18
4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD .....	19
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	19
4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD .....	19
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD .....	34
5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran .....	34
5.1.1. Pendapatan LRA .....	34
5.1.2. Belanja .....	34
5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional .....	36
5.2.1. Pendapatan-LO .....	36
5.2.2. Beban .....	36
5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas .....	40
5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca .....	41
5.4.1. Aset .....	41
5.4.2. Kewajiban .....	44
5.4.3. Ekuitas .....	45
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN OPD .....	46
BAB VII PENUTUP .....	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran per Rincian Obyek
- Lampiran 2. Laporan Berita Acara *Stock Opname* Barang
- Lampiran 3. Laporan Persediaan dan Berita Acara *Stock Opname* Barang
- Lampiran 4. Laporan Aset Tetap beserta Berita Acara Rekonsiliasi



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Soekarno-Hatta No. 2, Raba Bima. Telp./Fax (0374) 44088

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG Kota Bima yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Bima, Februari 2019  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

**Ir. DARWIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 199103 1 087

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN**  
**PENGEMBANGAN KOTA BIMA**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

**1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

**1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan pada masing-masing OPD diantaranya adalah, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;



- c) Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dana dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai teknis pelaksanaan program/kegiatan dan pendanaannya disesuaikan dengan kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi sumber daya pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan, kemampuan dan dana yang sudah disediakan dalam anggaran APBD.

Laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai teknis pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan OPD dalam pelaksanaan dan memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, anggaran dan barang-barang investasi yang dikelolanya.

Untuk memenuhi tujuan umum tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima berusaha untuk menyajikan informasi secara akuntabel dan Transparan mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah 01 Paragraf 13, tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas dalam hal ini adalah pimpinan OPD. Dalam lingkup pemerintah daerah yang dimaksud dengan pimpinan instansi adalah setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi dan setiap Walikota sebagai entitas pelaporan. Kewajiban dan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk setiap kepala OPD juga dinyatakan dalam Pasal 56 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan "Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan

laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan”.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai realisasi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD, selama periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OPD mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas akuntansi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode akuntansi untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Sedangkan prinsip Akuntansi yang diberlakukan di OPD adalah sebagai berikut:

1) Basis Akuntansi (*Accounting Base*)

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Relaisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

2) Nilai Historis (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3) Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Pendapatan, belanja, pembiayaan dicatat dan diakui berdasarkan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah terjadi.

4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya.

5) Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan, namun periode semesteran dan bulanan juga diperkenankan.

6) Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan

keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 8) Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO, beban, asset, kewajiban, ekuitas sebagai suatu entitas akuntansi.

Laporan Keuangan OPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh entitas akuntansi dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- Pendapatan
- Belanja
- Surplus/Defisit
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.

#### b) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO (basis akrual) adalah hak pemerintah kota yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah kota yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu pemerintah kota dari/kepada pemerintah kota lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut:

- Kas
- Piutang
- Persediaan
- Investasi
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Ekuitas

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi, dan Ekuitas Akhir.

e) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan

atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 2) Iktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- 3) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun;
12. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Walikota Bima Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 31 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Bima;
21. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

#### Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

#### Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

#### Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD



## Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

### 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 5.1.1. Pendapatan LRA

#### 5.1.2. Belanja

### 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

#### 5.2.1. Pendapatan-LO

#### 5.2.2. Beban

### 5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### 5.3.1. Perubahan Ekuitas

### 5.4. Penjelasan Pos-pos Neraca

#### 5.4.1. Aset

#### 5.4.2. Kewajiban

#### 5.4.3. Ekuitas

### 5.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu

## Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan SKPD

## Bab VII Penutup

### Lampiran-Lampiran:

- Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran per Rincian Obyek
- Lampiran 2 Laporan Piutang Pajak dan Penyisihan Pajak
- Lampiran 3 Laporan Piutang Retribusi dan Penyisihan Retribusi
- Lampiran 4 Laporan Berita Acara *Stock Opname* Barang
- Lampiran 5 Laporan Persediaan dan Berita Acara *Stock Opname* Barang
- Lampiran 6 Laporan Dana Bergulir dan Penyisihannya
- Lampiran 7 Laporan Aset Tetap beserta Berita Acara Rekonsiliasi
- Lampiran 8 Laporan Aset Tak Berwujud dan Amortisasi
- Lampiran 9 Laporan Aset Lain-lain

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**

#### **2.1. Ekonomi Makro**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya untuk kemakmuran rakyat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin dari laju pertumbuhan PDRB berdasarkan dasar harga konstan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan riil produksi barang dan jasa tanpa dipengaruhi oleh variabel perubahan harga.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya peranan tiap sektor dalam pembentukan PDRB, tetapi juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan masing-masing sektor utamanya yaitu laju pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB.

#### **2.2. Kebijakan Keuangan**

##### **a. Pendapatan Daerah**

BAPPEDA LITBANG pada Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat potensi PAD, sehingga tidak ditetapkan target dalam APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

##### **b. Belanja Daerah**

1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp7.893.367.000,00 dan dialokasikan untuk belanja non-program berupa Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.252.859.848,10.
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah

dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor pengangkutan, komunikasi, dan sektor jasa-jasa.

3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut di atas harus tetap dalam koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang telah tertuang dalam target APBD tahun 2018.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp8.718.644.382,00 dari yang ditargetkan sebesar Rp10.146.226.848,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.427.582.466,10 (14,10%). Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dalam pengeluaran total belanja secara umum yang mencakup belanja operasi dan belanja modal.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun Anggaran 2018 dengan tidak adanya realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp8.718.644.382,00.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan BAPPEDA LITBANG berdasarkan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018 adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.1.  
Kinerja Keuangan BAPPEDA LITBANG  
Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
<b>A</b>	<b>Non Program</b>	<b>2.252.859.848,10</b>	<b>2.214.465.995,00</b>	<b>38.393.853,10</b>	<b>98,30</b>
1	Non Kegiatan	2.252.859.848,10	2.214.465.995,00	38.393.853,10	98,30
<b>B</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.119.841.167,00</b>	<b>1.067.429.259,00</b>	<b>52.411.908,00</b>	<b>95,32</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	145.982.500,00	140.932.500,00	5.050.000,00	96,54
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.400.000,00	30.945.580,00	22.454.420,00	57,95
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	17.250.000,00	12.455.000,00	4.795.000,00	72,20
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	78.337.500,00	77.707.500,00	630.000,00	99,20
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	83,33
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.605.000,00	14.800.000,00	3.805.000,00	79,55
7	Penyediaan alat tulis kantor	60.680.000,00	60.680.000,00	0,00	100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48.900.000,00	48.866.000,00	34.000,00	99,93
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.624.000,00	19.624.000,00	0,00	100,00
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.200.000,00	48.650.000,00	550.000,00	98,88
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	76.600.000,00	65.430.000,00	11.170.000,00	85,42
12	Penyediaan makanan dan minuman	40.860.000,00	40.860.000,00	0,00	100,00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	491.787.167,00	488.468.679,00	3.318.488,00	99,33
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	17.415.000,00	17.010.000,00	405.000,00	97,67
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>317.558.550,00</b>	<b>291.105.550,00</b>	<b>26.453.000,00</b>	<b>91,67</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.682.500,00	91.082.500,00	600.000,00	99,35
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	121.500.000,00	99.300.000,00	22.200.000,00	81,73
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	104.376.050,00	100.723.050,00	3.653.000,00	96,50
<b>D</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00
<b>E</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>272.507.800,00</b>	<b>272.507.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	57.683.000,00	57.683.000,00	0,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	26.128.800,00	26.128.000,00	800,00	100,00
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.628.000,00	19.628.000,00	0,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	102.318.000,00	102.318.000,00	0,00	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	66.750.000,00	66.750.000,00	0,00	100,00
<b>F</b>	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>287.065.000,00</b>	<b>246.854.532,00</b>	<b>40.210.468,00</b>	<b>85,99</b>
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	45.815.000,00	44.315.000,00	1.500.000,00	96,73
2	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima	241.250.000,00	202.539.532,00	38.710.468,00	83,95
<b>G</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>726.076.500,00</b>	<b>234.547.607,00</b>	<b>491.528.893,00</b>	<b>32,30</b>
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	116.076.500,00	101.926.500,00	14.080.000,00	57,55
2	Koordinasi Review Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya	154.500.000,00	62.100.000,00	92.400.000,00	40,19
3	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	455.500.000,00	70.521.107,00	384.978.893,00	15,48
<b>H</b>	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>334.015.000,00</b>	<b>171.448.028,00</b>	<b>162.566.972,00</b>	<b>51,33</b>
1	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	39.400.000,00	33.850.000,00	5.550.000,00	85,91
2	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	22.355.000,00	22.110.000,00	245.000,00	98,90
3	Penyusunan Master Plan Drainase	155.000.000,00	56.700.000,00	98.300.000,00	36,58
4	Perencanaan Pengembangan Ruang Terbuka Publik	117.260.000,00	58.788.028,00	58.471.972,00	50,13
<b>I</b>	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>2.133.058.744,00</b>	<b>2.058.737.718,00</b>	<b>74.321.026,00</b>	<b>96,52</b>
1	Penyusunan rancangan RPJMD	132.525.000,00	131.131.200,00	1.393.800,00	98,95
2	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	106.000.000,00	93.075.000,00	12.925.000,00	87,81
3	Penetapan RPJMD	271.264.500,00	261.346.900,00	9.917.600,00	96,34
4	Penyusunan rancangan RKPD	120.878.000,00	112.078.000,00	8.800.000,00	92,72
5	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	415.044.231,00	412.504.231,00	2.540.000,00	99,39
6	Penetapan RKPD	163.953.000,00	163.953.000,00	0,00	100,00
7	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	331.830.000,00	331.325.000,00	505.000,00	99,85
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	317.000.000,00	312.162.342,00	4.837.658,00	98,47
9	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	140.000.000,00	112.598.032,00	27.401.968,00	80,43
10	E - Planning	109.519.013,00	103.519.013,00	6.000.000,00	94,52
11	Koordinasi Pelaksanaan Anugerah Pangripta Nusantara	25.045.000,00	25.045.000,00	0,00	100,00
<b>J</b>	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>60.485.000,00</b>	<b>57.185.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>94,54</b>
1	Pengembangan Ekonomi Lokal	60.485.000,00	57.185.000,00	3.300.000,00	94,54

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
<b>K</b>	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>956.312.989,00</b>	<b>895.074.583,00</b>	<b>61.238.406,00</b>	<b>93,60</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	472.527.003,00	416.298.597,00	56.228.406,00	88,10
2	Penyusunan Profile Kesehatan	72.100.000,00	70.350.000,00	1.750.000,00	97,57
3	Koordinasi dan Advokasi Kota Sehat	60.555.311,00	60.455.311,00	100.000,00	99,83
4	Koordinasi dan Advokasi Kota Layak Anak	96.266.355,00	96.106.355,00	160.000,00	99,83
5	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	91.781.220,00	89.031.220,00	2.750.000,00	97,00
6	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	58.100.000,00	58.100.000,00	0,00	100,00
7	Penyusunan Profil Kelurahan	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	100,00
8	Koordinasi Aksi Pemberantasan Korupsi	41.783.100,00	41.533.100,00	250.000,00	99,40
<b>L</b>	<b>Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>1.238.680.000,00</b>	<b>782.214.635,00</b>	<b>456.465.365,00</b>	<b>63,15</b>
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	1.001.165.000,00	550.230.245,00	450.934.755,00	54,96
2	Penyusunan KLHS RPJMD	237.515.000,00	231.984.390,00	5.530.610,00	97,67
<b>M</b>	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>	<b>141.290.000,00</b>	<b>136.092.650,00</b>	<b>5.197.350,00</b>	<b>96,32</b>
1	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	141.290.000,00	136.092.650,00	5.197.350,00	96,32
<b>N</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>264.476.250,00</b>	<b>248.911.825,00</b>	<b>15.564.425,00</b>	<b>94,12</b>
1	Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan	119.699.780,00	107.501.825,00	12.197.955,00	89,81
2	Pelayanan Izin Penelitian	62.830.000,00	61.480.000,00	1.350.000,00	97,85
3	Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Kelitbangan	81.946.470,00	79.930.000,00	2.016.470,00	97,54

## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja merupakan gambaran dari persentase tingkat pencapaian suatu program dan kegiatan BAPPEDA LITBANG selaku entitas akuntansi, baik secara fisik maupun keuangan. Dari data tersebut dapat diketahui kinerja BAPPEDA LITBANG dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA.

Secara umum dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA bila dinilai secara fisik rata-rata pencapaian kinerjanya tinggi, hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan sumber dana dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Akan tetapi realisasi keuangan untuk membiayai masing-masing program dan kegiatannya kurang dari 100%, hal ini disebabkan ada dana/sisa anggaran dari belanja modal, belanja barang serta belanja pegawai berupa belanja gaji sebagai bentuk efisiensi dan merupakan prestasi bagi SKPD dalam memanfaatkan anggaran secara optimal.

Realisasi keuangan Tahun Anggaran 2018 dan 2017 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.  
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Daerah BAPPEDA LITBANG Tahun Anggaran 2018

No.	Komponen	Tahun 2018 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>10.146.226.848,10</b>	<b>8.718.644.382,00</b>	<b>85,93</b>
<b>02.01</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.252.859.848,10</b>	<b>2.214.465.995,00</b>	<b>98,30</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.252.859.848,10	2.214.465.995,00	98,30
<b>02.02</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>7.893.367.000,00</b>	<b>6.504.178.387,00</b>	<b>82,40</b>
02.02.01	Belanja Pegawai	2.661.235.000,00	2.614.635.000,00	98,25
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	5.108.182.000,00	3.818.993.387,00	74,76
02.02.03	Belanja Modal	123.950.000,00	70.550.000,00	56,92
	<b>SiLPA</b>	<b>(10.146.226.848,10)</b>	<b>(8.718.644.382,00)</b>	<b>85,93</b>

Tabel 3.2.  
Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja  
Daerah BAPPEDA LITBANG Tahun Anggaran 2017

No.	Komponen	Tahun 2017 (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>9.452.360.268,55</b>	<b>9.352.670.767,00</b>	<b>98,95</b>
<b>02.01</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.506.142.468,55</b>	<b>2.431.784.074,00</b>	<b>97,03</b>
02.01.01	Belanja Pegawai	2.506.142.468,55	2.431.784.074,00	97,03
<b>02.02</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6.946.217.800,00</b>	<b>6.920.886.693,00</b>	<b>99,64</b>
02.02.01	Belanja Pegawai	2.108.522.000,00	2.102.331.000,00	99,71
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	4.693.395.800,00	4.687.640.693,00	99,88
02.02.03	Belanja Modal	144.300.000,00	130.915.000,00	90,73
	<b>SiLPA</b>	<b>(9.452.360.268,55)</b>	<b>(9.352.670.767,00)</b>	<b>98,95</b>

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

#### **a. Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Terdapat sumber daya yang memadai dalam mendukung jalannya program kegiatan organisasi yang kompeten.

#### **b. Faktor penghambat dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Ruang kerja yang tidak kondusif dalam mendukung program kerja organisasi.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi tersebut disusun sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Kota Bima Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin-Buletin Teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk pelaporan keuangan perangkat daerah di lingkungan Kota Bima, asumsi dasar yang digunakan adalah:

1. Kemandirian Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi merupakan unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. Kesenambungan Entitas, Pemerintah Kota Bima sebagai entitas pelaporan maupun SKPD dibawahnya sebagai entitas akuntansi berlanjut keberadaannya/berkesinambungan.
3. Keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*), yaitu bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Mata uang yang digunakan untuk pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan adalah mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah.

Periode akuntansi yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan yaitu berdasarkan tahun anggaran, yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

#### **4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

- a. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### **4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

#### **4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD**

##### **a. Pendapatan-LRA**

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Klasifikasi atas Pendapatan-LRA dirinci lebih lanjut pada Bagan Akun Standar.
- 3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 4) Pendapatan-LRA diakui pada saat:
  - Pendapatan telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat pendapatan yang dipungut oleh/disetor kepada Bendahara Penerimaan SKPD namun belum disetorkan ke Kas Umum Daerah tidak diakui sebagai pendapatan LRA;
  - Diterima di OPD;

- Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD;
- Pendapatan telah diterima oleh BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dicatat sebagai pendapatan daerah;
- Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di OPD pemungut dan penyetor;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang kurang dari 3 (tiga) bulan berupa bunga deposito diakui menambah pendapatan bunga;
- Hasil atas investasi jangka pendek yang berusia 3-12 bulan, dan hasil investasi berupa obligasi diakui menambah pendapatan bunga;
- Bila terdapat aset tetap/lainnya yang dijual oleh Pemerintah Kota Bima, maka atas hasil penjualan tersebut diakui sebagai pendapatan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Atas uang jaminan pemeliharaan atau perbaikan atau uang retensi, diakui Pendapatan LRA ketika pihak ketiga dinyatakan tidak memenuhi janji sesuai dengan kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Kota Bima;
- Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama;
- Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Dalam LRA, pembayaran restitusi (pengembalian kelebihan bayar) pendapatan

tersebut oleh Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan SP2D LS dengan menggunakan akun Belanja Tak Terduga;

- Pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
  - Pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- 5) Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

#### **b. Belanja**

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 3) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 4) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 5) Belanja daerah diklasifikasikan menurut Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran dan Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- 6) Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar
- 7) Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- 8) Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

- 9) Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan mukalaporan realisasi anggaran (LRA).
- 10) Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- 11) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 12) Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 13) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
  - Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
  - Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  - Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.
- 14) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### **c. Pembiayaan**

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan yang dirinci lagi menurut sumber pembiayaan, dan pengeluaran pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci lagi menurut jenis pengeluaran pembiayaan.
- 3) Penerimaan pembiayaan meliputi: SiLPA tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah, dan Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah.
- 4) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal (investasi) daerah, Pembayaran pokok utang, dan Pemberian pinjaman daerah.
- 5) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 6) Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisaperhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SiLPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
- 7) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 8) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan, dan penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 9) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

- 10) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 11) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 12) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima untuk memanfaatkan surplus anggaran dan menggali sumber dana untuk menutupi defisit anggaran.

#### **d. Pendapatan-LO**

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).
- 3) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 4) Pendapatan-LO pada PPKD meliputi: pendapatan transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- 5) Pendapatan-LO pada SKPD meliputi: PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.
- 6) PAD melalui penetapan ini diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima yang disahkan dengan penetapan.
- 7) PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bima tanpa didahului dengan penetapan secara resmi yang dikirimkan ke Pemerintah Kota Bima karena proses bisnis yang tidak memungkinkan.
- 8) Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

#### **e. Beban**

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui saat: timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- 3) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Bima dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 4) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 5) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- 6) Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Penyusutan dan amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Bunga, dan Beban Transfer.

#### **f. Aset/Aktiva**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

### **1) Aset Lancar**

- a) Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- b) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN) Pemerintah jangka pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c) Kas adalah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas (jatuh tempo kurang dari tiga bulan) tanggal perolehannya.
- e) Kas diakui pada saat diterima oleh Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Badan Layanan Umum Daerah. Kas yang dikeluarkan untuk belanja oleh BUD diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah sedangkan bagi SKPD diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh PA/KPA setelah diverifikasi oleh PPK OPD.
- f) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki 3 (tiga) bulansampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal pelaporan.
- g) Investasi jangka pendek terdiri atas deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan, pembelian obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka

pendek, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

- h) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Bima dan/atau hak Pemerintah Kota Bima yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa, perjanjian, terbitnya ketetapan atas pajak daerah dan retribusi daerah, atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan atau akibat lainnya yang sah.
- i) Piutang terdiri atas: piutang pajak, retribusi, dana perimbangan, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan piutang yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah.
- j) Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yaitu pada saat :Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- k) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- l) Persediaan dapat terdiri atas: Persediaan alat tulis kantor, persediaan alat listrik, persediaan material/bahan, persediaan benda pos, persediaan bahan bakar, dan Persediaan bahan makanan pokok.
- m) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

## **2) Investasi Jangka Panjang**

- a) Investasi jangka panjang adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka panjang terdiri dari:
  - i. Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidakberkelanjutan atau suatu

waktu akan dijual atau ditarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa: pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir, dan investasi non permanen lainnya.

- ii. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dapat berupa: penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah, dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain penambahan modal pada Koperasi Pegawai Negeri.
- c) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria: Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- d) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- e) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu: metode biaya dengan kriteria kepemilikan kurang dari 20%; metode ekuitas dengan kriteria kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%, metode nilai bersih yang direalisasikan dengan Kriteria kepemilikan bersifat nonpermanen.
- f) Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- g) Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

- h) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- i) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah, beserta perubahan atas Peraturan Pemerintah tersebut jika ada..

### **3) Aset Tetap**

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bima atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber APBD (sebagian atau seluruhnya) melalui pengadaan, pembangunan, atau dapat juga diperoleh dari donasi atau pertukaran dengan aset lainnya.
- c) Aset tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.
- d) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- e) Peralatan dan mesin, meliputi alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan alat persenjataan/keamanan.
- f) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum dan rambu-rambu.
- g) Jalan irigasi dan jaringan, meliputi jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

- h) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya, meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barangbercorak kesenian/ kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.
- i) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- j) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- k) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- l) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- m) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- n) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya, di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

- o) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **4) Dana Cadangan**

- a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi/tahun anggaran.
- b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan dan pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

#### **5) Aset Lainnya**

- a) Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
- b) Aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
- c) Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak untuk menagih atas penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran, pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi.
- d) Piutang dari tagihan penjualan angsuran diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam pembayaran dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- e) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
- f) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri/bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya.
- g) Piutang dari Tuntutan Ganti Rugi diukur sebesar nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab seseorang sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

- h) Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- i) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
- j) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
- k) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- l) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- m) Aset Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar.
- n) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
- o) Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
- p) Kewajiban
- q) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- r) Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- s) Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

- t) Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, utang beban dan utang jangka pendek lainnya.
- u) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- v) Kewajiban jangka panjang meliputi utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
- w) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- x) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **6) Ekuitas**

- a) Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Bima pada tanggal laporan
- b) Ekuitas dana terdiri dari ekuitas yang digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Kota Bima yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. dan ekuitas untuk dikonsolidasikan yang digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di OPD.
- c) Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO ke dalam neraca. Sedangkan ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dengan OPD. Pada akhir periode akuntansi, ekuitas untuk dikonsolidasikan ini akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasi.
- d) Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

**5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran**

**5.1.1. Pendapatan-LRA**

Tahun Anggaran 2018, BAPPEDA LITBANG tidak ditargetkan adanya PAD karena tidak adanya potensi PAD.

**5.1.2. Belanja**

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Belanja BAPPEDA LITBANG meliputi Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang, sedangkan Belanja Modal hanya berupa Peralatan dan Mesin.

Secara umum belanja Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp10.146.226.848,10 dan terealisasi sebesar Rp8.718.644.382,00 atau 85,93%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.427.582.466,10. Terdapat penurunan realisasi belanja tahun 2018 sebesar Rp634.026.385,00 atau 0,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yakni sebesar Rp9.352.670.767,00.

Tabel 5.1.  
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Operasi	10.022.276.848,10	8.648.094.382,00	86,29	9.221.755.767,00
2.	Belanja Modal	123.950.000,00	70.550.000,00	56,92	130.915.000,00
3.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>10.146.226.848,10</b>	<b>8.718.644.382,00</b>	<b>85,93</b>	<b>9.352.670.767,00</b>

**A. Belanja Operasi**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp10.022.276.848,10 dan terealisasi sebesar Rp8.648.094.382,00 atau 86,29%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.374.182.466,10. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.221.755.767,00 maka realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 menunjukkan penurunan sebesar Rp573.661.385,00 atau 6,22%.

Tabel 5.2.  
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1.	Belanja Pegawai	4.914.094.848,10	4.829.100.995,00	98,27	4.534.115.074,00
2.	Belanja Barang	5.108.182.000,00	3.818.993.387,00	74,76	4.687.640.693,00
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.022.276.848,10</b>	<b>8.648.094.382,00</b>	<b>86,29</b>	<b>9.221.755.767,00</b>

### 1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp4.914.094.848,00 dan terealisasi sebesar Rp4.829.100.995,00 atau 98,27%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp84.993.853,10. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.534.115.074,00, maka realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp294.985.921,00 atau 6,51%.

Tabel 5.3.  
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
<b>I.</b>	<b>Belanja Pegawai - Tak Langsung</b>				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.009.259.848,10	1.984.718.995,00	98,78	2.121.626.574,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	243.600.000,00	229.747.000,00	94,31	310.157.500,00
<b>II.</b>	<b>Belanja Pegawai - Langsung</b>				
1.	Honorarium PNS	2.661.235.000,00	2.614.635.000,00	98,25	2.102.331.000,00
2.	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah (I+II)</b>		<b>4.914.094.848,10</b>	<b>4.829.100.995,00</b>	<b>98,27</b>	<b>4.534.115.074,00</b>

### 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp5.108.182.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.818.993.387,00 atau 74,76%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.289.188.613,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.687.640.693,00, maka realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2018 menunjukkan penurunan sebesar Rp868.647.306,00 atau 18,53%.

Tabel 5.4.  
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
1	Belanja Bahan Pakai Habis	475.897.050,00	474.288.500,00	99,66	482.320.500,00
2	Belanja Jasa Kantor	219.050.000,00	165.425.580,00	75,52	186.766.161,00
3	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	121.626.050,00	113.178.050,00	93,05	132.796.000,00
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	386.965.250,00	386.896.250,00	99,98	419.569.500,00
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.250.000,00	3.000.000,00	24,49	26.000.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
6	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.500.000,00	14.500.000,00	100,00	16.500.000,00
8	Belanja Makanan dan Minuman	295.583.000,00	260.595.000,00	88,16	500.584.000,00
9	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
10	Belanja Perjalanan Dinas	1.709.385.650,00	1.646.465.007,00	96,32	2.144.394.532,00
11	Belanja Pemeliharaan	181.605.000,00	154.600.000,00	85,13	154.480.000,00
12	Belanja Jasa Konsultansi	1.378.000.000,00	341.700.000,00	24,80	244.010.000,00
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	162.650.000,00	120.250.000,00	73,93	222.000.000,00
14	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	107.870.000,00	95.295.000,00	88,34	158.220.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.108.182.000,00</b>	<b>3.818.993.387,00</b>	<b>74,76</b>	<b>4.687.640.693,00</b>

## B. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp123.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.550.000,00 atau 56,92%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp130.915.000,00, maka realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2018 menunjukkan penurunan sebesar Rp60.365.000,00 atau 46,11%.

Tabel 5.5.  
Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi 2018	%	Realisasi 2017
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>					
1	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	26.000.000,00	0,00	0,00	130.915.000,00
2	Pengadaan Alat Kantor	24.150.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengadaan Komputer	61.000.000,00	57.950.000,00	95,00	0,00
4	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>123.950.000,00</b>	<b>70.550.000,00</b>	<b>56,92</b>	<b>130.915.000,00</b>

## 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

### 5.2.1. Pendapatan-LO

Tahun anggaran 2018, BAPPEDA LITBANG tidak ditargetkan adanya PAD karena tidak adanya potensi PAD.

### 5.2.2. Beban

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban operasi pada BAPPEDA LITBANG Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan,

Beban Perjalanan Dinas, serta Beban Penyusutan dan Amortisasi. Rincian beban tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6.  
Beban-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Beban Pegawai	4.830.883.590,00	4.533.552.698,00	297.330.892,00	6,56
2	Beban Persediaan	1.384.752.800,00	1.743.170.000,00	(358.417.200,00)	(20,56)
3	Beban Jasa	543.975.580,00	401.586.161,00	142.389.419,00	35,46
4	Beban Pemeliharaan	154.600.000,00	9.500.000,00	145.100.000,00	1.527,37
5	Beban Perjalanan Dinas	1.646.465.007,00	2.144.394.532,00	(497.929.525,00)	(23,22)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	302.673.278,00	374.978.815,00	(72.305.537,00)	(19,28)
<b>JUMLAH</b>		<b>8.863.350.255,00</b>	<b>9.207.182.206,00</b>	<b>(343.831.951,00)</b>	<b>(3,73)</b>

#### A. Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.830.883.590,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp4.533.552.698,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp297.330.892,00 (6,56%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7.  
Beban Pegawai-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Gaji dan Tunjangan	1.986.501.590,00	2.124.364.198,00	(137.862.608,00)	(6,49)
2	Tambahan Penghasilan PNS	229.747.000,00	310.157.500,00	(80.410.500,00)	(25,93)
3	Honorarium	2.614.635.000,00	2.099.031.000,00	515.604.000,00	24,56
<b>JUMLAH</b>		<b>4.830.883.590,00</b>	<b>4.533.552.698,00</b>	<b>297.330.892,00</b>	<b>6,56</b>

#### B. Beban Persediaan

Beban persediaan tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.163.779.750,00. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.402.474.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp238.694.250,00 (17,02%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8.  
Beban Persediaan-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Alat Tulis Kantor	216.745.750,00	306.531.500,00	(89.785.750,00)	(29,29)
2	Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Battery Kering)	19.624.000,00	20.979.000,00	(1.355.000,00)	(6,46)
3	Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya	17.520.000,00	13.320.000,00	4.200.000,00	31,53

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.032.500,00	16.860.000,00	(11.827.500,00)	(70,15)
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	2.902.500,00	2.190.000,00	712.500,00	32,53
6	Bahan untuk Cinderamata/Souvenir	91.500.000,00	35.750.000,00	55.750.000,00	155,94
7	Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho	81.850.000,00	66.690.000,00	15.160.000,00	22,73
8	Percontohan/Peraga/Display Bahan Pakai	39.113.750,00	20.000.000,00	19.113.750,00	95,57
9	Penggantian Suku Cadang	18.191.850,00	33.100.000,00	(14.908.150,00)	(45,04)
10	Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	82.531.200,00	85.596.000,00	(3.064.800,00)	(3,58)
11	Uang Saku Peserta Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan lainnya	120.250.000,00	222.000.000,00	(101.750.000,00)	(45,83)
12	Cetak	15.340.000,00	18.200.000,00	(2.860.000,00)	(15,71)
13	Penggandaan	274.411.250,00	320.989.500,00	(46.578.250,00)	(14,51)
14	Penjilidan	88.145.000,00	75.380.000,00	12.765.000,00	16,93
15	Cetak Foto/Dokumentasi	9.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00
16	Makanan dan Minuman Harian Pegawai	59.355.000,00	206.700.000,00	(147.345.000,00)	(71,28)
17	Makanan dan Minuman Rapat	182.340.000,00	266.884.000,00	(84.544.000,00)	(31,68)
18	Makanan dan Minuman Tamu	18.900.000,00	27.000.000,00	(8.100.000,00)	(30,00)
19	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
20	Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.384.752.800,00</b>	<b>1.743.170.000,00</b>	<b>(358.417.200,00)</b>	<b>(20,56)</b>

### C. Beban Jasa

Jumlah beban jasa pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp651.770.580,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp609.486.161,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp42.284.419,00 (6,94%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9.  
Beban Jasa-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Jasa Telepon	30.945.580,00	35.996.161,00	(5.050.581,00)	(14,03)
2	Jasa Surat Kabar/Majalah	10.880.000,00	18.000.000,00	(7.120.000,00)	(39,56)
3	Jasa Paket/Pengiriman	600.000,00	720.000,00	(120.000,00)	(16,67)
4	Jasa Non Pegawai	72.950.000,00	55.150.000,00	17.800.000,00	32,28
5	Jasa Perawatan Halaman Kantor	1.000.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	(16,67)
6	Jasa Perawatan AC	4.250.000,00	9.900.000,00	(5.650.000,00)	(57,07)
7	Jasa Perawatan Komputer	4.300.000,00	28.300.000,00	(24.000.000,00)	(84,81)
8	Jasa Perawatan Non Komputer/Elektronik/Meubelair	2.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)
9	Jasa Publikasi/Iklan	38.000.000,00	30.000.000,00	8.000.000,00	26,67
10	Jasa Service	8.265.000,00	5.700.000,00	2.565.000,00	45,00

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
11	Surat Tanda Nomor Kendaraan	4.190.000,00	8.400.000,00	(4.210.000,00)	(50,12)
12	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	26.000.000,00	(23.000.000,00)	(88,46)
13	Sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
14	Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	66,67
15	Sewa Sound System	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
16	Sewa Tanaman Hias	5.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)
17	Jasa Konsultasi Perencanaan	252.500.000,00	0,00	252.500.000,00	100,00
18	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	95.295.000,00	158.220.000,00	(62.925.000,00)	(39,77)
<b>JUMLAH</b>		<b>543.975.580,00</b>	<b>401.586.161,00</b>	<b>142.389.419,00</b>	<b>35,46</b>

#### D. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2018 sebesar Rp267.778.050,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp142.296.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp125.482.050,00 (88,18%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10.  
Beban Pemeliharaan-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.550.000,00	3.000.000,00	48.550.000,00	1.618,33
2	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	99.300.000,00	0,00	99.300.000,00	0,00
3	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	3.750.000,00	6.500.000,00	(2.750.000,00)	(42,31)
<b>JUMLAH</b>		<b>154.600.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>145.100.000,00</b>	<b>1.527,37</b>

#### E. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2018 sebesar Rp1.646.465.007,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.144.394.532,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp497.929.525,00 (23,22%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11.  
Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	99.965.000,00	160.949.000,00	(60.984.000,00)	(37,89)
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.546.500.007,00	1.983.445.532,00	(436.945.525,00)	(22,03)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.646.465.007,00</b>	<b>2.144.394.532,00</b>	<b>(497.929.525,00)</b>	<b>(23,22)</b>

## F. Beban Penyusutan

Beban penyusutan atas aset tetap tahun 2018 sebesar Rp302.673.276,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp374.978.815,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp72.305.537,00 (19,28%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12.  
Beban Penyusutan-LO Tahun Anggaran 2018 dan 2017

NO.	URAIAN	2018 (Rp)	2017 (Rp)	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	162.608.313,00	170.796.073,00	(8.187.760,00)	(4,79)
2	Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	3.979.470,00	479.600,00	3.499.870,00	729,75
3	Penyusutan Alat Ukur	0,00	183.333,00	(183.333,00)	(100,00)
4	Penyusutan Alat Kantor	7.034.029,00	8.147.333,00	(1.113.304,00)	(13,66)
5	Penyusutan Alat Rumah Tangga	12.779.528,00	27.831.833,00	(15.052.305,00)	(54,08)
6	Penyusutan Komputer	92.118.431,00	112.130.571,00	(20.012.140,00)	(17,85)
7	Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	10.669.115,00	21.281.486,00	(10.612.371,00)	(49,87)
8	Penyusutan Alat Studio	5.624.667,00	22.271.333,00	(16.646.666,00)	(74,74)
9	Penyusutan Alat Komunikasi	399.850,00	1.199.550,00	(799.700,00)	(66,67)
10	Penyusutan Unit-unit Laboratorium	0,00	3.499.870,00	(3.499.870,00)	(100,00)
11	Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.459.875,00	7.157.833,00	302.042,00	4,22
<b>JUMLAH</b>		<b>302.673.278,00</b>	<b>374.978.815,00</b>	<b>(72.305.537,00)</b>	<b>(19,28)</b>

### 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

#### 5.3.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp2.747.750.961,91, yang bersumber dari ekuitas akhir tahun 2017. Jika dibandingkan ekuitas awal tahun 2017 sebesar Rp2.477.271.328,00, maka terdapat peningkatan sebesar Rp270.479.633,91 (10,92%).

### 5.3.2. Surplus/Defisit LO

Defisit-LO pada tahun 2018 sebesar Rp8.863.350.255,00, yang bersumber dari Laporan Operasional tahun 2018.

### 5.3.3. Koreksi

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Tahun anggaran 2018 ini, yang menambah ekuitas BAPPEDA LITBANG bersumber dari Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp551.933.618,00.

### 5.3.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir tahun anggaran 2018 sebesar Rp3.154.978.706,91. Jika dibandingkan Ekuitas Akhir tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.747.750.961,91, maka terdapat peningkatan sebesar Rp407.227.745,00 (14,82%).

## 5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 5.4.1. Aset

#### A. Aset Lancar

Aset lancar pada Neraca BAPPEDA LITBANG tahun anggaran 2018 ini berupa Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Saldo ini merupakan kas atau utang pemotongan pajak pusat PPN dan PPh yang belum disetorkan ke Kas Negara atau Kas Daerah, sebesar Rp1.288.769,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	PPN	1.147.318,00	0,00
2	PPh Pasal 22	141.451,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.288.769,00</b>	<b>0,00</b>

#### B. Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap tahun 2018 sebesar Rp2.571.678.683,91. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp2.259.901.953,91, maka Aset Tetap tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp311.776.730 atau 0,14%.



Tabel 5.14.  
Rincian Aset Tetap Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No.	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017
1	Peralatan dan Mesin	2.528.587.913,33	2.342.304.913,33
2	Gedung dan Bangunan	298.395.000,00	298.395.000,00
3	Aset Tetap Lainnya	1.736.619.000,00	1.484.119.000,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	89.200.000,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan	(2.081.123.229,42)	(1.864.916.959,42)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.571.678.683,91</b>	<b>2.259.901.953,91</b>

Penjelasan terhadap kondisi Aset Tetap tersebut, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

### 1) Peralatan dan Mesin

Jumlah Peralatan dan Mesin BAPPEDA LITBANG per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.528.587.913,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15.  
Rincian Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Alat Besar Angkutan	880.260.000,00	704.979.000,00
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	26.132.350,00	26.132.350,00
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.496.346.113,33	1.485.344.113,33
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	125.849.450,00	125.849.450,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.528.587.913,33</b>	<b>2.342.304.913,33</b>

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi	Saldo
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		<b>2.342.304.913,33</b>
Penambahan:		282.000.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan:		(95.717.000,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>2.528.587.913,33</b>

### 2) Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan BAPPEDA LITBANG per 31 Desember 2018 sebesar Rp298.395.000,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja. Nilai aset ini sama dengan tahun 2017.

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi	Saldo
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		298.395.000,00
Penambahan:		0,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan:		(0,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>298.395.000,00</b>

### 3) Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya BAPPEDA LITBANG per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.736.619.000,00, berupa Buku dan Perpustakaan. Tahun 2017, nilai aset ini sebesar Rp1.484.119.000,00.

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi	Saldo
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		1.484.119.000,00
Penambahan:		252.500.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan:		(0,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>1.736.619.000,00</b>

### 4) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan BAPPEDA LITBANG per 31 Desember 2018 sebesar Rp89.200.000,00, berupa Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan.

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi	Saldo
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>		0,00
Penambahan:		89.200.000,00
- Belanja Modal Tahun 2018		
Pengurangan:		(0,00)
<b>Saldo per 31 Desember 2018</b>		<b>89.200.000,00</b>

## 5) Akumulasi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp2.081.123.229,42 dari aset tetap dan akumulasi penyusutan tahun 2017 sebesar Rp1.864.916.959,42.

Tabel 5.16.

Rincian Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Golongan Peralatan dan Mesin	2.058.515.156,42	1.849.768.761,42
2	Golongan Gedung dan Bangunan	22.608.073,00	15.148.198,00
3	Golongan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.081.123.229,42</b>	<b>1.864.916.959,42</b>

### 5.4.2. Kewajiban

#### A. Kewajiban Jangka Pendek

##### 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 masing-masing sebesar Rp1.288.769,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17.

Rincian Utang PFK Tahun Anggaran 2018 dan 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
4	PPN	1.147.318,00	0,00
5	PPH Pasal 22	141.451,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.288.769,00</b>	<b>0,00</b>

##### 2) Utang Beban

Utang beban tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.898.227,00.

### 5.4.3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih BAPPEDA LITBANG, yang diperoleh dari selisih antara Aset dan Kewajiban pada tanggal laporan. Ekuitas BAPPEDA LITBANG sebesar Rp3.154.978.706,91.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN OPD**

Pembentukan BAPPEDA LITBANG berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BAPPEDA LITBANG menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi;
- 2) Penetapan rencana strategis Badan untuk mendukung visi dan misi Daerah serta kebijakan;
- 3) Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka perencanaan dan percepatan pembangunan Daerah;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- 6) Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah secara makro;
- 7) Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ);
- 8) Pelaksanaan program kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peningkatan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, Kerjasama Pembangunan, Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya, Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam serta Penyiapan potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah serta pengembangan peraturan Perundang-undangan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penetapan petunjuk teknis pembangunan daerah, pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan serta wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah

serta keserasian pembangunan daerah sesuai manajemen pengembangan wilayah dan kawasan daerah yang searah dengan kebijakan umum daerah;

- 10) Pengoordinasian kegiatan Sekretaris Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAPPEDA LITBANG dipimpin oleh Kepala Badan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota nomor 900/517/XI/2018 tanggal 28 November 2018 tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bima.

Kondisi kepegawaian BAPPEDA LITBANG Kota Bima saat ini memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai yaitu sejumlah 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebagai berikut:

A. Berdasarkan Golongan terdiri dari:

1. Golongan IV : 6 (enam) orang
2. Golongan III : 28 (dua puluh delapan) orang
3. Golongan II : 2 (dua) orang

B. Berdasarkan Jabatan Struktural terdiri dari 16 (enam belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Eselon II b : 1 (satu) orang, yaitu Kepala Badan
2. Eselon III a : 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Badan
3. Eselon III b : 3 (tiga) orang, terdiri dari Kabid.
4. Eselon IV a : 11 (sebelas) orang, terdiri atas 2 (dua) orang Kasubbag  
9 (sembilan) orang Kasubbid.
5. Staf terdiri atas 20 (dua puluh) orang.

C. Berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri atas :

1. Strata 2 (S2) : 10 (sepuluh) orang
2. Strata 1 (S1) : 23 (dua puluh tiga) orang
3. Sarjana Muda : 1 (satu) orang
4. SLTA : 2 (dua) orang

Secara lebih terperinci, hingga akhir tahun 2018, keadaan pegawai pada BAPPEDA LITBANG Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	S3	-	-
2.	S2	10	27,78%
3.	S1	23	63,89%
4.	Diploma 3	1	2,78%
5.	SMA / sederajat	2	5,55%
Total		36	100%

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Golongan IV	6	16,67%
2.	Golongan III	28	77,78%
3.	Golongan II	2	5,55%
4.	Golongan I	-	-
Total		36	100%

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

No.	Pegawai	Jumlah	Persentase
1.	Eselon II	1	2,78%
2.	Eselon III	4	11,11%
3.	Eselon IV	11	30,56%
4.	Non-Eselonering	20	55,55%
Total		36	100%

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Laporan keuangan tahun anggaran 2018 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua keuangan saat ini ataupun nanti.

Sebagaimana diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya.

Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Bima khususnya BAPPEDA LITBANG, dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Catatan atas Laporan Keuangan BAPPEDA LITBANG tahun anggaran 2018 ini, diharapkan dapat menunjang akuntabilitas Pemerintah Kota Bima dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kota Bima telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bima di masa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan BAPEPDA LITBANG Kota Bima Tahun Anggaran 2018 ini dapat berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan, dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas dimasa yang akan datang.

Kota Bima, Februari 2019  
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

**Ir. DARWIS**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 199103 1 087





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN KOTA  
BIMA  
NERACA  
Per 31 Desember 2018 dan 2017**

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	2018	2017
1	<b>ASET</b>		
2	<b>ASET LANCAR</b>		
3	Kas Di Kas Daerah	0.00	0.00
4	Kas Dana Kapitasi	0.00	0.00
5	Kas Di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
7	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	1,288,769.00	0.00
8	Piutang Pajak	0.00	0.00
9	Penyisihan Piutang Pajak	0.00	0.00
10	Piutang Pajak Netto	0.00	0.00
11	Piutang Retribusi	0.00	0.00
12	Penyisihan Piutang Retribusi	0.00	0.00
13	Piutang Retribusi Netto	0.00	0.00
14	Piutang Dana Bagi Hasil	0.00	0.00
15	Piutang Deviden	0.00	0.00
16	Bagian Lancar Tuntuta Ganti Rugi	0.00	0.00
17	Belanja Dibayar Dimuka	0.00	0.00
18	Persediaan	0.00	0.00
19	<b>Jumlah Aset Lancar (3 s.d. 18)</b>	<b>1,288,769.00</b>	<b>0.00</b>
20	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
21	Investasi Non Permanen		
22	Dana Bergulir	0.00	0.00
23	Dana bergulir diragukan tertagih	0.00	0.00
24	<b>Jumlah Investasi Non Permanen (22+23)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25	Investasi Permanen		
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0.00	0.00
27	<b>Jumlah Investasi Permanen (26)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (24+27)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	<b>ASET TETAP</b>		
30	Tanah	0.00	0.00
31	Peralatan dan Mesin	2,528,587,913.33	2,342,304,913.33
32	Gedung dan Bangunan	298,395,000.00	298,395,000.00
33	Jalan, Jaringan dan Instalasi	0.00	0.00
34	Aset Tetap Lainnya	1,736,619,000.00	1,484,119,000.00
35	Konstruksi Dalam Pengerjaan	89,200,000.00	0.00
36	Akumulasi Penyusutan	(2,081,123,229.42)	(1,864,916,959.42)
37	<b>Jumlah Aset Tetap (30 s.d. 36)</b>	<b>2,571,678,683.91</b>	<b>2,259,901,953.91</b>
38	<b>ASET LAINNYA</b>		
39	Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00
40	Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
41	Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00
42	Aset Tak Berwujud Netto	0.00	0.00
43	Aset Lain-lain	588,198,250.00	492,481,250.00
44	<b>Jumlah Aset Lainnya (39 s.d. 43)</b>	<b>588,198,250.00</b>	<b>492,481,250.00</b>
45	<b>JUMLAH ASET (19+28+37+44)</b>	<b>3,161,165,702.91</b>	<b>2,752,383,203.91</b>

NO.	URAIAN	2018	2017
46	<b>KEWAJIBAN</b>		
47	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1,288,769.00	0.00
49	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
50	Utang Belanja	0.00	0.00
51	Utang Beban	4,898,227.00	4,632,242.00
52	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
53	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (48 s.d. 52)</b>	<b>6,186,996.00</b>	<b>4,632,242.00</b>
54	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (53)</b>	<b>6,186,996.00</b>	<b>4,632,242.00</b>
55	<b>EKUITAS</b>		
56	Ekuitas	3,154,978,706.91	2,747,750,961.91
57	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (54+56)</b>	<b>3,161,165,702.91</b>	<b>2,752,383,203.91</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Kota Bima, Februari 2019  
Kepala Badan,

**Ir. DARWIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 199103 1 087

## BERITA ACARA PERHITUNGAN BARANG PERSEDIAAN

(Stock Opname Barang Habis Pakai)

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hajratul Aini, S.Sos.  
Jabatan : Pengurus Barang  
SKPD : BAPPEDA LITBANG Kota Bima

telah melakukan pemeriksaan fisik dan perhitungan barang persediaan (*stock opname* barang habis pakai) dengan rincian sebagai berikut:

No.	NamaBarang	Banyak Barang	Harga Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
1	Alat Tulis Kantor (ATK)			0,00
	- Kertas			
	- Dst...			
2	Alat Listrik			0,00
	-			
	-			
3	Material/ Bahan			0,00
	-			
	-			
4	Benda Post			0,00
	- Meterai			
	- Prangko			
5	Bahan Bakar			0,00
	- Bensin			
	- Solar			
6	Bahan Makanan Pokok			0,00

Berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pengguna Barang,

Pengurus Barang

**Ir. DARWIS**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19601231 199103 1 087

**HAJRATUL AINI, S.Sos**  
NIP. 19800502 200701 2 015